



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENGINPUTAN KEGIATAN PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2017 HASIL PEMBAHASAN ANTARA BADAN ANGGARAN
DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU**

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Dalam rangka mengakomodir beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum selesai melakukan penginputan sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penginputan kegiatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 41 Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan perpanjangan waktu input kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :

1. penambahan kegiatan baru hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 3. perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD :
1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. menginput belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;
 3. menginput proyeksi dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah; dan
 4. menginput proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaporkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 - a. penginputan komponen belanja baru tersebut pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 - b. penginputan harga satuan biaya untuk kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD menghitung proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kemudian melaporkannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD; dan
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan pada sistem e-budgeting sesuai hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pelaksanaan perpanjangan waktu input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadwalkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 pukul 23:59.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian
Kependudukan dan Permukiman
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta